

**LARANGAN KEPALA DESA MENJADI PENGURUS
PARTAI POLITIK**

**(Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Huruf g Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

MUAZZA TURROMI

NPM :1421020201

Program Studi :Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kepemimpinan merupakan hal terpenting dalam suatu pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan Desa. di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seirama dengan berlakunya pada pasal 29 Huruf G dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ini sangat menentukan netralitas seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik.

Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana yang memadai dan ditunjang dengan keadaan situasi sosial masyarakat yang kondusif. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap perundang-undangan, karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan serta stabilitas sosial politik masyarakat Desa yang dipimpipinnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang kepala desa tidak bisa menjadi pengurus partai politik dan larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik terhadap Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa kepala Desa di larang menjadi pengurus partai politik serta bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik. Dengan tidak keterlibatan kepala desa dalam jajaran pengurus partai politik untuk menjaga kefokusn dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Jenis penelitian ini tergolong kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, majalah, Koran serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan pertama, Dalam hal ini Pasal 29 Huruf g UU No. 6 Tahun 2014, disebutkan dengan jelas bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya kepala desa harus bersifat netral dalam pemilu dan dalam kegiatan kampanye yang berkaitan politik praktis. Kedua, Fiqih siyasah memandang penting etika dalam berpolitik, dan akhlak siyasah yang bersandarkan al-qur'an dan al-hadits menjadi suatu bentuk upaya umat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, begitupun larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik sesuai dengan syariat Islam bahwa seorang pemimpin harus patuh dan taat serta istiqomah menjalankan hukum-hukum Allah dalam kedudukannya selaku pemimpin pemerintahan desa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukkarama Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **LARANGAN KEPALA DESA MENJADI PENGURUS PARTAI
POLITIK (Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Huruf g
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)**

Nama : **MUAZZA TURROMI**

NPM : **1421020201**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin. M.Ag

NIP.195707051989031001

Ahmad Nisomudin. S.Ag.M.Ag

NIP.197611142005011004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah Syari'iyah**

Dr. Nurnazli, S.H.S.Ag.M.H

NIP.197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "LARANGAN KEPALA DESA MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK (Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Huruf g Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)" disusun oleh Muazza Turromi, NPM: 1421020201, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis 02 Januari 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

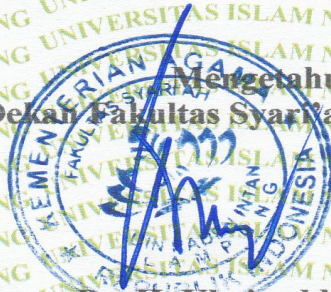
Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Penguji Utama : Drs. H. Jayusman, M.Ag

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Penguji II : Ahmad Ngisomudin, S.Ag, M.Ag

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
۝۸

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah ayat 8).*¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, PT. Pantja Cemerlang, 2012, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya ilmiah ini kepada orang yang selalu mencintai dan memberi makna dalam hidupku terutama bagi:

1. Kedua orang tua ku Ayah Handa M.Yusuf dan Ibu Saminah yang selalu setia memberikan pengorbanan selama ini dalam mendidik, membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu mendo'akan untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak-kakak ku Roma Usdiyanto, Hibrurropi, Arbi Gunawan yang telah memberiku semangat dan membantuku agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Aditya Pratama, Muhammad Husen, Sahrudin, Miftahul Ilmi, Alif Ramadhani, Albed Domersi, Mufleh Haja, Ahmad Khotib, Haris Wanto, dan khususnya kepada anak-anak Siyasah C Angkatan 2014, yang telah menemani baik suka maupun duka serta telah membantu pemikiran maupun tenaga dan motivasi sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan tempatku menuntut ilmu, telah mendewasakanku dalam berfikir, bertindak serta memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depanku.

RIWAYAT HIDUP

Muazza Turromi, Dilahirkan Pada Tanggal 01 April 1992 Di Desa Kejadian Lom, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. Anak pertama dari empat saudara dari Bapak M.Yusuf dan Saminah. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. SDN Negeri 01 Kejadian Lom : Tamat Tahun 2005
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Alhidayah Pertiwi : Tamat Tahun 2008
3. Madrasah Aliyah (MA) Al-Ikhlash Pertiwi : Tamat Tahun 2011
4. Selanjutnya pada Tahun 2014, Penulis Melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dengan Konsentrasi pada Jurusan Hukum Tata Negara.

Demikianlah riwayat hidup dan jenjang pendidikan penulis yang pernah di tempuh, semoga bisa memberikan secercah makna dalam menggapai masa depan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“LARANGAN KEPALA DESA MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK.”(Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)** Selawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, dan Para Pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah, Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan (Pendidikan) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dari semua pihak tak lupa penulis ucapkan trimakasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairudin Tahmid, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap pada kesulitan Mahasiswa.

3. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku Ketua Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Frenki, M.Si., Selaku Seketaris Jurusan Siyasah yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
5. Dr.H.Bunyana Sholihin,M.Ag. Selaku pembimbing 1 yang selalu meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ahmad Ngisomudin.S.Ag,M.Ag, Selaku pembimbing 2 yang telah menyediakan waktunya serta memberikan arahan, saran dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Para Staf Kariawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada saya selama kuliah.
8. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan refrensi.
9. Teman-teman Siyasah C Angkatan 2014, yang mengawali hari-hari di kampus dengan penuh kebersamaan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan yang arif untuk membangun sehingga dapat membantu kami dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Amin

Kepada Allah SWT Penulis memohon ampun, rahmat, hidayah dan inayahnya. Semoga Allah mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar belakang masalah	3
D. Fokus Masalah.....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan dan Signifikansi penelitian	12
G. Metode penelitian	13

BAB II LANDASAN TIORI

A. Pengertian Pemimpin.....	15
B. Syarat-Syarat Pemimpin	17
C. Tipe-Tipe Pemimpin.....	18
D. Fungsi Pemimpin.....	19
E. Pengertian Pemimpin Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.....	20
F. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Perspektif Fiqih Siyasah	25
G. Pemimpin Harus Netral Dalam Perspektif Fiqih Siyasah	28
H. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam Perspektif Fiqih Siyasah....	34
I. Kajian Pustaka	37

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Dan pandangan Terhadap Pasal 29 Huruf g Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	39
B. Pelarangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik Pasal 29 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.....	43
C. Sanksi Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Desa Pasal 29 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.....	45
D. Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa	48

BAB IV ANALISIS

- A. Analisis Latar Belakang Kepala Desa Tidak Bisa Menjadi
Pengurus Partai Politik. 58
- B. Analisi Fiqih Siyasah Terhadap Larangan Kepala Desa
Menjadi Pengurus Partai Politik Dalam UU No.06 Tahun 2014
Tentang Desa 61

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 65
- B. Rekomendasi 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut :

1. “Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (*Analisis fiqh Siyasah terhadap Pasal 29 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa*).

Larangan Kepala Desa menjadi pengurus partai politik telah melanggar secara etika dan yuridis, karena sesuai Pasal 29 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan kepala desa dilarang masuk dalam pengurus partai politik. Begitupun dengan sanksinya jelas bagi kepala desa masuk dalam kepeguruan partaipolitik adalah pemberhentian.¹

2. Analisis Fiqh Siyasah.

Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²

¹ Leo Agustino, *Kajian Setrategik, Langgar Undang-Undang Desa Kepala Desa Masuk Parpol Harus diberhentikan*, Jakarta, 2015. h. 19-20

² H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009. h. 1

3. Pasal 29 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Jadi dalam Pasal 29 Huruf g UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.³ Artinya Kepala Desa harus bersifat netral dalam pemilu dan dalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan desa.

Dalam hal ini, kepala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik manapun. Tujuannya, agar kepala desa bisa melayani warganya secara netral dan independen, apabila kepala desa menjadi pengurus partai politik dikhawatirkan akan terjadi perilaku tidak seimbang atau tidak netral dalam menjalankan roda pemerintahan desa ataupun dalam konteks pilkada dan pemilihan umum.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih judul skripsi ini, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, sebagai berikut:

1. Dengan terbitkannya Pasal 29 Huruf G Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa mempunyai acuan hukum yang jelas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan Undang-Undang tersebut terkait Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik.
2. Sesuai dengan jurusan yang ditekuni yaitu Siyasah. Pandangan Fiqh Siyasah untuk menjadi barometer tentang penerapan ketentuan Pasal 29

³ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. *Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa*, 2015. h. 17-18

Huruf G Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Dengan kata lain Fiqh Siyasah adalah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi nasional akan kokoh apa bila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian publik terarah pada sistem dan perjalanan demokrasi di tingkat nasional. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik rill. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya di libatkan dalam perhelatan-perhelatan demokratis daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah.

Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tak kalah penting, diantaranya sebagai perwujudan demokrasi dalam politik nasional. Akan tetapi demi kuatnya demokrasi secara nasional, penumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih massif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat Desa. Di antaranya melalui demokratisasi Desa. Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 selanjutnya disebut UU Desa

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 4

secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Ikhwal yang harus diperjelas adalah: mengapa demokratisasi Desa penting. Tidakkah proses demokratisasi yang masih terus berlangsung sampai saat ini di tingkat nasional Desa menjadi demokratis. Lantas, bagaimana demokratisasi Desa akan dilakukan. Tiga pertanyaan tersebut mewakili gambaran umum apa yang akan diulas dalam tulisan ini.⁵ Secara umum, tulisan ini akan membahas mengenai signifikansi demokratisasi Desa sebagai arena bagi demokrasi serta prinsip-prinsip demokrasi yang harus dikembangkan di Desa kerangka kerja demokratisasi Desa dan peran Pendamping dalam demokratisasi Desa.

Demokratisasi Desa merupakan frase tersendiri yang sengaja dibedakan dengan demokratisasi di Desa. Demokratisasi Desa mewakili semangat UU Desa yang mengakui Desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, seperti tertangkap dari frase

⁵ *Ibid*, h. 15

demokratisasi di Desa. Sebaliknya, Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi Desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa.

Signifikansi atau nilai penting demokratisasi Desa dilator belakang oleh dua hal. *Pertama*, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa.⁶ Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa.

Latar belakang *kedua* terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas

⁶ Dhurorudin Mashad, *Konflik Elite Politik Di Pedesaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Dipandang dari sudut kepentingan masyarakat Desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi Desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat Desa membangun. Desa tampil sebagai subyek yang merencanakan dan menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Sementara di sisi lain, hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal dan elitisme penyelenggara pemerintah Desa demokrasi dibutuhkan untuk mengembangkan modal sosial masyarakat Desa dalam berhadapan dan mengelola kekuasaan Desa. Melalui demokrasi, dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat Desa akan posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati.

Rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan desa membawa implikasi pada desain demokrasi yang dikembangkan di Desa. Demokrasi desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat disamarupakan dengan demokrasi di tingkat nasional. Hak asal-usul, pola sosial budaya desa, karakteristik masyarakat desa, dan kenyataan sosiologis masyarakat desa menuntut adaptasi dari sistem modern apapun apabila ingin berjalan di desa, tidak terkecuali demokrasi.⁷

Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut.

Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari

⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas, Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.170.

pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti di nyatakan oleh seorang antropolog, perasaan sebagai sesama orang sedesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan. Hubungan-hubungan tersebut seringkali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, saudara dekat dengan saudara jauh, berkerabat atau tidak berkerabat.⁸

Kedua, hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi Desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi Desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal (*local wisdom*) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat Desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air.

⁸ *Ibid*, h.81

Berkait dengan itu, *ketiga*, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosial budaya Desa yang khas. Kehidupan Desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap Desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, Banyak Desa yang masih mempergunakan *trah* atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa.

Keempat, solidaritas yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong. Masyarakat Desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat Desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, dalam UU Desa sifat-sifat itu justru diakui dan diterima sebagai fakta objektif yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan masyarakat Desa, termasuk dalam hal berdemokrasi.⁹

Kepala Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Demikian yang disebut

⁹ Undang-undang Desa, *Kelurahan dan Kecamatan* (Bandung: Penerbit Fokus Media, 2014), h. 4.

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan di dalam sebuah Desa.

Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Jadi dalam Pasal 29 Huruf G UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa Kepala Desa di larang menjadi pengurus partai politik, artinya Kepala Desa harus bersifat netral dalam pemilu dan dalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan desa. Jadi, sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa ini dilarang untuk berpolitik dalam arti menjadi pengurus partai politik. Aturan eksplisit yang mengatur larangan kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik ini terdapat dalam Pasal 29 huruf g UU Desa.¹⁰

Tujuannya semata-mata agar tidak ada unsur politik dalam memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri, namun masih terdapat beberapa desa yang jauh dari kota atau pemerintah daerah yang mana kepala desa masih mengikuti politik praktis pada saat pemilihan umum berlangsung.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (*Permendagri*). Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa. h. 35

Dan dalam melaksanakan alam melaksanakan tugasnya pada pasal 26 ayat (1), yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban, yang diatur pula dalam pasal 26, yaitu kewenangan diatur pada ayat (2); hak-hak yang timbul diatur pada ayat (3); dan kewajiban diatur pada ayat (4).¹¹

Tampaknya pembentuk UU Desa membedakan antara kewajiban kepala desa dalam konteks khusus, yaitu menjalankan tugas yang diatur pasal 26 ayat (1) dan kewajiban dalam konteks melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban secara umum. Karena itu, kepala Desa selain memiliki kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 26 ayat (4), juga memiliki kewajiban lain dan sanksinya yang diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 berikut,

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam Pasal 27 bahwa Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali kota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali kota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

¹¹ *Op Cit*, Undang-Undang Desa. h. 25

- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) ditegaskan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam Ayat (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian,. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan latar belakang di atas adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah ayat 8).*

Oleh karena itu, penulis mengangkat isu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (*Analisis Siyasaah Syar'iyah terhadap Pasal 29 Huruf G Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa*)”.

D. Fokus Masalah

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2015, h. 108

- a) Larangan Kepala Desa ikut serta dalam politik praktis dan menjadi pengurus partai politik.
- b) Pasal 29 Huruf G Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa.

E. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana latar belakang Kepala Desa tidak bisa menjadi pengurus partai politik. ?
- 2. Bagaimana Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai politik menurut Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.?

F. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

- 1. Untuk mengetahui mengapa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik pada menurut Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.?
- 2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap larangan Kepala Desa menjadi pengurus partai politik menurut Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.?

Adapun Signifikansi penelitian ini adalah :

Sebagai kontribus dan informasi terhadap masyarakat bahwa kepala desa dilarang terlibat dalam partai politik serta Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang fungsi dikeluarkan nya undang-undang tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, majalah, koran serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu Al Qur'anul karim dan Hadist sebagai sumber utama fiqih siyasah. Dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulis.
- b. Data Sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu artikel-artikel dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca buku atau literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat diamati. Dalam analisis kualitatif ini menggunakan metode

berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa- peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini data yang dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan¹³

5. Metode Analisis Masalah

Dalam rangka upaya mencari jawaban atas permasalahan di angkat,perlu kiranya dilakukan analisis mendalam terhadap permasalahan dengan menggunakan data yang valid dan akurat. Sehubungan dengan tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,maka teori analisis yang di anggap tepat untuk di terapkan dalam menganalisis masalah disini adalah teori mashlahat, yaitu menghindari hal-hal negatif untuk mendapatkan hal-hal yang positif.

¹³*Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. h. 21*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemimpin

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan.¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun (*pemberi contoh*) atau penunjuk jalan. Jadi secara fisik pemimpin itu berada didepan. Tetapi pada hakikatnya, dimanapun tempatnya, seseorang dapat menjadi pemimpin dalam memberikan pimpinan. Dalam bahasa Inggris, istilah kepemimpinan disebut dengan *leadership*. Seiring dengan istilah tersebut, Soehardjono,² memaparkan istilah kepemimpinan (*leadership*) secara etimologis, *leadership* bersal dari kata “*to lead*” (bahasa inggris) yang artinya memimpin, Selanjutnya timbullah kata “*leader*” artinya pemimpin yang akhirnya lahir istilah *leadership* yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan.

Menurut Wahjosumidjo, dalam praktek organisasi, kata “memimpin” mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya.³

¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990, h.684

² Soehardjono, *Kepemimpinan: Suatu Tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya*, Malang:APDN Malang Jawa Timur, 1998, h.127

³ Anoraga, *Pendekatan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan*, Surabaya:Usaha Nasional, 1990, h.349

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama (mengolaborasi dan mengolaborasikan potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi, bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering di identikkan dengan perilaku kepemimpinan dari pimpinanya. Dengan demikian, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi atau lembaga yang dipimpin, hal ini menempatkan posisi pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi atau pada lembaga tertentu. Sementara itu Nawawi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.⁵

Berdasarkan uraian tentang definisi kepemimpinan diatas, terlihat bahwa unsur kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan pada gilirannya akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak di pengaruhi. Peranan penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang yang memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam organisasi / lembaga tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Wirawan, “mempengaruhi” adalah proses dimana proses orang yang mempengaruhi berusaha merubah kompetensi,

⁴ Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik*, (Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA,2012), h.48

⁵ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), h. 81

perilaku, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, pikiran dan tujuan yang dipengaruhi secara sistematis.⁶

B. Syarat-Syarat Pemimpin

Adapun syarat untuk menjadi pemimpin antara lain.

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah hak otoritas dan legilitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu.

2. Kewibawaan

Kewibawaan merupakan keunggulan kelbihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain patuh padanya.

3. Kemampuan

Kemampuan merupakan sumber kekuatan seorang pemimpin, kesanggupan, secara teknis maupun sosial, yang melebihi anggota biasa. Sementara James. A.Lee menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai pernyataan, antara lain:⁷

- a) Kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai.
- b) Prestasi, gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu.
- c) Tanggungjawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, percaya diri dan agresif.
- d) Partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, koopretatif, mampu bergaul.

⁶ *Op.Cit.* Wirawan, h. 135

⁷ Mujiono, Imam. *Kepemimpinan dan Organisasi*, Yogyakarta. UII Press. 2002, h. 18

C. Tipe Pemimpin

Pada umumnya para ahli menggolongkan tipe pemimpin dalam kepemimpinan menjadi enam tipe berikut ini:⁸

a. Otoriter

Kepemimpinan tipe ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak dia. Ia menganggap, dialah yang berhak menentukan segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan. Biasanya pemimpin yang termasuk golongan ini ialah pemilik perusahaan.

b. Demokratis

Seorang pemimpin yang demokratis selalu berunding dengan bawahannya sebelum mengambil keputusan.

c. Paternal

Pemimpin yang bersifat kebapakan pada dasarnya hampir mendekati sifat otokrat, walaupun sang pemimpin berusaha menganggap bawahan seperti seorang ayah terhadap anaknya.

d. Personal

Tipe pemimpin personal atau pribadi biasanya ditemui pada perusahaan kecil ketika kontak antara puncak pimpinan dan bawahannya lebih sering terjadi bila dibandingkan dengan perusahaan besar. Kontak atau hubungan pribadi antara sang pemimpin dan yang dipimpin sering sangat menolong dalam kelancaran jalannya perusahaan.

⁸ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hal. 179-180

e. Non-personal

Suatu pimpinan nonpersonal, jika ada kepemimpinan tersebut dilakukan melalui instruksi, sumpah atau janji. Jadi, hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin hanyalah melalui instruksi atau sumpah saja.

f. Interaksi

Pemimpin tipe interaksi ini ialah pemimpin yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menuju satu tujuan khusus.

D. Fungsi Pemimpin

Fungsi pemimpin dalam kepemimpinan bisa terlihat dari gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial atau kelompok/organisasi.⁹ Adapun fungsi itu memiliki dua dimensi seperti:

- a) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
- b) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi.¹⁰

⁹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 236.

¹⁰ *Ibid*, h. 53

E. Pengertian Pemimpin Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Kata pemimpin dalam bahasa arab memiliki beberapa istilah yaitu imam, khalifah, malik, sultan, wali, dan amir. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-Yaummu-imaman*). Yang berarti ikutan.¹¹ Kata imam juga digunakan bagi orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, untuk memimpin pasukan atau untuk orang dengan fungsi lainnya.¹² Dengan demikian kata imam yang bermaksud pemimpin dalam arti umum bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik dan atau mengurus masalah agama sekaligus, kemudian kata imam yang bermaksud pemimpin dalam arti khusus yakni sebagai pemimpin spiritual bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi tuntutan keadaan.¹³ Kata Imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawakan kebaikan.

Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu didalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam sebagai kepala Negara atau imam umat Islam atau imam dalam artian mengimami salat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-imamah al-udhma atau al-imamah al-kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-imamah al-shugra, mayoritas masyarakat memahami imam digunakan dalam penyebutan seseorang pemimpin dalam bidang agama. Kata khalifah berasal dari kata al-khalaf yang berarti al-badal yang artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang, sebagaimana firman Allah swt (Q.S. al-Baqarah: 255).

¹¹ Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Cet. 8 Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, h. 48.

¹² Ali Al-Salus, *Imamah Dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997, h. 15.

¹³ J. Suyuti Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. 2 Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 60.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ ۝٢٥٥

Artinya: Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. (Q.S. al-Baqarah: 255).¹⁴

Dengan demikian khalifah juga diartikan sebagai pengganti, sebab orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut, khalifah dapat pula diartikan seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang. Pada hakikatnya manusia lebih mulia dari malaikat sehingga Allah swt menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi.¹⁵ Sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. al-Baqarah: 30).¹⁶

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th, h. 42.

¹⁵ Yunahar ilyas, *kuliah aqidah Islam*, Yogyakarta: Lppi, h. 90

¹⁶ *OP Cit*, Kementrian Agama RI, h. 6.

Dalam perkembangannya kata khalifah yang menjadi institusi diberi pengertian sebagai pemerintahan suatu Negara sebagai pengganti nabi yang bertugas memelihara agama dan bertanggung jawab terhadap urusan umat.¹⁷ Istilah selanjutnya menunjukkan kepada pemimpin adalah malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku dan Negara.¹⁸

Sultan secara bahasa berarti raja, kata-kata sultan menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam alquran dan al-hadits, seperti di dalam hadits bukhari:

Artinya: “Dari ibnu abbas bahwa nabi SAW bersabda: barangsiapa benci kepada rajanya akan sesuatu (dalam perkara agama). Maka hendaklah sabar, mak sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan ia akan mati seperti matinya orang jahiliyah” (HR.Bukhari).¹⁹

Istilah lainnya menunjukkan kepada pemimpin yaitu wali berarti penguasa atau pemerintah.¹⁰ Dalam persoalan ini tentunya pada tingkat pertama kita berupaya mencari pokok persoalannya dari al-quran, maka kita akan mendapati pemakaian kata “uli ‘i-amr” yang artinya sama dengan waliy-u ‘i-amr. Yaitu pada surah an-nisa ayat 59 dan surah (An-Nisa ayat 59).

¹⁷ Sirajuddin, M. M.Ag, *Politik Ketatanegaraan Islam Study Pemikiran A. Hasjmy*, Cet. 1. Bengkulu : pustaka pelajar, 2007, h. 105

¹⁸ Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Cet. 8; Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, h. 428.

¹⁹ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: AlIkhlas, 1992. h. 367.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS.An-Nisa :59).*²⁰

Pemaknaan kata rasul dan ulil amri ialah tokoh-tokoh sahabat dan Para cendekiawan di antara mereka. Menurut mufassirin yang lain Maksudnya ialah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.²¹ Imamduddin ibn katsir menukilkan keterangan ibnu abbas yakni yang dimaksud dengan uli ‘i-amr yaitu ahli dalam masalah-masalah agama, pendapat yang sama juga dilontarkan mujahid ‘Atha, Alhasan Al bashri dan abdul aliyah (semuanya ulama tabiin).²²

Selain itu adapula istilah amir bagi sebutan seorang pemimpin yang berarti penguasa yang diberi kewenangan dalam satu urusan tertentu atau daerah kekuasaan tertentu.²³ pengertian ini diperkuat dengan ayat alquran yaitu surah annahl ayat 43 dan surah almaidah ayat 63.

²⁰ *OP Cit*, Kementrian Agama RI, h. 87

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2005.h.113

²² Nurcholish Madjid,Dkk, *Islam Universal*, Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007, h. 189.

²³ *Ibid*, h. 190

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

*Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS.AN-Nahl:43).*²⁴

Ahli fiqih yakni imam abul hasan ‘ali al-mawardi yang beliau ambil dari pendapat ibnu abbas ra. Bahwa yang dimaksud dengan kedua ayat tersebut adalah para ulama. Demikian pula pendapat jabir al-hasan dan atha’. Dengan demikian dapat ditarik sebuah pengertian bahwa amir ialah penguasa atau pemimpin tertinggi pemerintahan sampai kepada pejabat-pejabat yang berwenang didaerahdaerah, atau dalam urusan-urusan yang diserahkan pengelolaannya kepada mereka. kewenangannya juga disebut dengan imarah dan pejabatnya disebut dengan amir.²⁵

Istilah Amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam, seperti *amirul mu'minin*, *amirul muslimin* dan *amirul umara*'. Karena itu ia bisa digunakan untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer. Secara resmi penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul pada pertemuan di saqifah bani saidah dimana sahabat rasulullah saw Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, sedangkan gelar amir baru digunakan pada saat pemerintahan Umar Bin Khattab.²⁶

²⁴ *Ibid*, h. 118

²⁵ *Op Cit*, Nurcholish Madjid, Dkk, h. 190-191

²⁶ *Op cit*, J. Suyuti Pulungan, h. 63-64

F. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah

Syarat pemimpin menurut al-mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu: *Pertama:* al-adalah yang berarti adil. *Kedua:* memiliki ilmu pengetahuan hingga tercapai taraf mujtahid. *Ketiga:* lengkap panca inderanya dan sehat dari segi pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya. *Keempat:* tidak memiliki kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi untuk bergerak. *Kelima:* Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemashlahatan mereka. *Keenam:* Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. *Ketujuh:* Nasab dari keturunan quraisy.²⁷

Menurut imam al-ghazali. Dalam Bukunya *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kriteria yang dikemukakan alGhazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah:

- 1) Dewasa atau aqil baligh dan memiliki otak yang sehat.
- 2) Laki-laki dan merdeka dan bukan budak
- 3) Keturunan Quraisy dan memiliki Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- 4) Kekuasaan yang nyata dan mempunyai Ilmu pengetahuan.
- 5) memiliki sifat Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*).²⁸.

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, h. 5.

²⁸ Ajat Sudrajat, *kepemimpinan dan masalah legitimasi dalam perspektif Islam..* (t.t: t.p, t.th),h.7.lihatjuga,<http://staffnew.uny.ac.id/.../Kepemimpinan+dan+Masalah+Legitimasi+dalam+Perspektif+Islam.pdf>

Al-Qalqasyandi Dalam bukunya yang berjudul *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, al-Qalqasyandi berujar: Para ulama dari madzhab Syafi'i menganggap keabsahan kepemimpinan pada empat belas hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu: *pertama*: Laki-laki, karenanya tidak akan valid kepemimpinan seorang wanita. *Kedua*: Baligh. *Ketiga*: Berakal. *Keempat*: Dapat melihat, karenanya tidak akan valid kepemimpinan orang buta. *Kelima*: Dapat mendengar. *Keenam*: Dapat berbicara, karenanya tidak akan valid kepemimpinan orang bisu. *Ketujuh*: Anggota tubuhnya normal dari segala kecacatan yang mungkin bisa menghalangi dinamika dan aktivitas yang efektif. *Kedelapan*: Merdeka. *Kesembilan*: Islam. *Kesepuluh*: Adil. *Kesebelas*: Berani dan tangguh. *Kedua belas*: Berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus yang dihadapi dan hukum-hukum yuridis. *Ketiga belas*: Berpendapat dan beragama yang benar, karenanya tidak akan absah kepemimpinan orang yang naif berpendapat. Dan *keempat belas*: Keturunan, karenanya tidak akan valid kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat ini. Unsur keturunan yang dimaksudkan adalah keturunan Quraisy.

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat: Pertama: Islam, diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir, berdasarkan firman Allah swt, Q.S. Ali Imran:28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ
الْمَصِيرُ ٢٨

*Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Al-Imran:28).*²⁹

Menurut beliau kepala Negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas seorang khalifah. *Kedua:* lakilaki, seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin Negara, dikarenakan pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan. *Ketiga:* Taklif. Yaitu sudah dewasa. *Keempat:* memiliki ilmu pengetahuan. *Kelima:* Adil. Yaitu terhindar menghiiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah serta terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji, dan mungkar. *Keenam:* memiliki kemampuan dan kecakapan. *Ketujuh:* sehat jasmani dan rohani. *Kedelapan:* keturunan quraisy.dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pemimpin bernasab keturunan quraisy. Karena hadits yang mengatakan imam (pemimpin) dari quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas.jadi tidak berlaku secara umum.³⁰

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 53.

³⁰ A.Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,1984, h.164.

Ibn Rabi mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala Negara. *Pertama* : kebapaan dan berasal dari keluarga raja, *kedua* : bercita-cita besar yang bisa diperoleh dari pendidikan dan akhlaq, *ketiga* : berpandangan kokoh, *keempat* : tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan, *kelima* : memiliki harta yang banyak untuk memakmurkan Negara dan pemeratakan keadilan, *keenam* : memiliki pembantu-pembantu yang loyalitas tinggi.³¹

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan syarat bagi kepala Negara, *pertama* : memiliki ilmu pengetahuan, *kedua* : Adil, *ketiga* : mampu melaksanakan tugas kenegaraan, *keempat* : sehat jasmani dalam artian panca indera dan anggota badannya yang lain.³² Dari kalangan pemikir modern seperti Rasyid Ridho menyebutkan syarat-syarat kepala Negara, *pertama* : memiliki sifat adil, *kedua* : berilmu dan mampu berjihad, *ketiga* : sehat panca indera, *keempat* : sehat anggota badan, *kelima* : mempunyai pandangan luas, *keenam* : berani, *ketujuh* : berasal dari keturunan Quraisy.³³

G. Pemimpin Harus Netral Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Imamah dalam al-Qur'an diulang tujuh kali dengan kandungan arti yang beragam dalam pandangan Thabathab'Al, imamh atau pemimpin merupakan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideology politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan.³⁴ Orang yang disebut imamah bermakna

³¹ Suyuti Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 254.

³² Djazuli, M.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 2. Bandung : Prenada Media, 2003, h. 112.

³³ Musdah Mulia, *Negara Islam*. Cet. 1. (Depok : Kata Kita, 2010), h. 259-260

³⁴ Dedi Supriadi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*, Bandung, Pustaka Setia: 2008, h. 86

kepemimpinan ummat.³⁵ Penjelasan ini sejalan dengan pengertian khilafah. Dalam pandangan fiqh siyasah pemimpin melakukan suatu sikap yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥

*Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf ayat 55).*³⁶

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama AlAllamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenarbenarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.³⁷

Dari pemahaman ini, pemimpin memiliki kesamaan sikap Nabi saw. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan perlu

³⁵ Abdul hakim. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Penerbit. Ciputat Prees: Ciputat, 2005, h. 51

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012, h. 242.

³⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 229

bersandar pada landasan hukum islam agar sesuai dengan etika pemimpin dalam Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam.³⁸

Tujuan berdakwah dengan upaya mempropagandakan diri, kelompok, golongan ataupun lembaga tertentu dan program-programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Sosialisasi merupakan bagian penting dalam percaturan politik. Melalui hal tersebut, seorang pemimpin dapat memperkenalkan program-programnya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai tersebut. Dari pemahaman ini, seorang pemimpin memiliki sikap kesamaan dengan berdakwah.

Adapun etika seorang pemimpin yang sesuai dengan adab-adab islam atau tidak kerpihakan, diantaranya:³⁹

1. *Tarbawy* (Edukatif)

Komitmen dengan nilai-nilai edukatif, persuasif dan tidak memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kegiatan keagamaan dan kegiatan politik praktis adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam hal ini tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak seseorang kepada kelompok, golongan, dan atau lembaga

³⁸ Thariq As-Suwaider, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Terj. Faishal Umar, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 30

³⁹<http://www.lintasgayo.com/56083/kampanye-dan-etikakampanyedalamislam.html>. tanggal 18 januari 2020, pukul 13.45 wib

tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang. Dengan demikian, kampanye edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye/da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Sebagaimana dalam memeluk agama, manusia diberikan hak untuk beragama sesuai keyakinannya. Allah SWT. berfirman dalam surat (QS. Al Baqarah ayat 256).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah.256)⁴⁰

2. Tha'ah (Keta'atan)

Ta'at dan komitmen kepada seluruh aturan Allah, perundangan yang berlaku, dan tidak larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan keta'atan kepada Allah, seperti kewajiban shalat. Bagi seorang muslim, saat berkampanye jangan sampai mengabaikan keta'atan kepada Allah apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan keta'atan kepada aturan yang berlaku, dan berpacu pada aturan syariat islam yang berkenaan dengan kegiatan politik praktis sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri dan allah swt.

⁴⁰ Kementerian Agama . *AL-Qur'an terjemahan, Ibid*, h. 243

3. *Uswah* (Keteladanan)

Menampilkan dan menyampaikan program-program pemerintahan dengan cara keteladanan yang terbaik (Ihsan). Di antara etika yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan kinerja dan kualitas diri seorang pemimpin. Pemimpin tidak perlu menjelekkkan dan menjatuhkan harga diri orang lain, atau golongan seperti *black campaign*. Bagus juga harus disampaikan dengan cara yang bagus dan profesional.

4. *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Tetap menjaga ukhuwah (peraudaraan), tidak ghibah, caci maki, dan cemooh. Kampanye bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hujuraat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al Hujuraat ayat 10).⁴¹

⁴¹ *Ibid*, h. 435

5. *Ikhlas* (Keikhlasan)

Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Sikap tidak keberpihakan dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta terutama pemimpin dalam dunia praktisi. Agar yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Bayyinah ayat 5;

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al Bayyinah ayat 5).⁴²

Berdasarkan adab-adab yang harus dimiliki seorang pemimpin ataupun pimpinan negara, ditinjau dari Fiqh Siyasah harus bersikap netral dan tidak keberpihakan terhadap kelompok, golongan, lembaga tertentu dalam rangka mempolitisasi hak asasi manusia dikarenakan perbuatan tersebut bagian dari dosa besar yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah dan sebuah kejahatan yang ditolak hukum.

H. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 434

Dalam hal ini kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Sunni, Syiah Dan Murjiah, mayoritas pengikut mu'tazilah dan khawarij kecuali sekte najdat mengatakan bahwa mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu akan berdosa bila meninggalkannya.⁴³

Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sekte Khawarij, utamanya fathiyah ibn amir al-hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya terserah kepada kehendak umat atau rakyat melakukan atau tidak, umat atau rakyat tidak akan berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala apabila meninggalkannya. Sebab tidak ada satupun dalil naqliyah maupun aqliyah yang memrintahkannya ataupun melarangnya.⁴⁴

Menurut Al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu keharusan agama. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagiaan akhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, menurut Al-Ghazali seorang kepala Negara (pemimpin) amat dibutuhkan untuk memlihara ketertiban dunia, ketertiban dunia berguna bagi ketertiban agama yang

⁴³ Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. h. 60.

⁴⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, h. 108.

pada gilirannya akan memberikan kebahagiaan akhirat, agama dan kepala Negara menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang.⁴⁵

Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Am al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman beliau merupakan pengikut mu'tazilah juga berpandangan seperti pandangan kaum najdat yang berpandangan bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia kepada kebenaran. Namun bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh mengangkat seorang pemimpin untuk meluruskan.⁴⁶

Berbeda dengan apa yang dinyatakan al-asham, Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-asham tidak mengerti dengan syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan orang-orang yang mengikutinya. Menurut AlQurtubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud dan hukum-hukumnya dapat dijalankan dengan baik.⁴⁷ Al-qurtubi memperkuat argumentasinya dengan firman Allah swt QS.Al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ۝٣٠

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Al-Baqarah:30).

⁴⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam*, Cet. 1. (Depok : Kata Kita, 2010), h. 259.

⁴⁶ *Op Cit*, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, h. 108. -109

⁴⁷ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah Fathurrahman Dkk, Dari Al-jami Li Ahkam Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Azam, 2010, h.588.

Pasca wafatnya Rasulullah saw. Para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar shiddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW.⁴⁸ pengangkatan Abu Bakar Shiddiq diwarnai dengan perdebatan dan perselisihan antara kaum muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Saidah, dimana kaum anshar mencalonkan sa'ad bin ubadah menjadi calon khalifah dan dari kaum muhajirin mencalonkan Abu Bakar, yang mana menurut masing-masing kelompok, kedua orang ini lah yang layak dan sepantasnya memegang kendali pemerintahan sepeninggalan Rasulullah SAW.⁴¹ Ketika itu kaum Anshar berkata "dari kami amir dan dari kalian amir."⁴⁹

Dengan penjelasan dan perdebatan yang panjang serta semangat persatuan dan kesatuan yang tertanam didalam hati para sahabat saat itu, akhirnya Abu Bakar terpilih karena penghargaan sahabat mengenai semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi dan masing-masing dari pihak yang berselisih menerima dan membaiaat Abu Bakar shiddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW.⁵⁰ Hal ini lah yang memperkuat argumentasi Al-Qurtubi tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin.

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Kewajiban tersebut menurut al-rayis bukan kewajiban individual tetapi kewajiban kolektif. Karena itu, seluruh umat Islam akan berdosa apabila tidak melaksanakannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam terlepas dari

⁴⁸ Harun Nasution. *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Dan Analisis Perbandingan*, Cet. 4. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, h.5.

⁴⁹ Drs.H.Fatah Syukur NC, M.Ag. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet.3. Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2011, h.50.

⁵⁰ Bernad Lewis, *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah..* Bandung: Pedoman Ilmu, 1998, h.38.

dosa akibat meninggalkannya. Pendapat ini juga disampaikan oleh al-mawardi dan Al-Ghazali.⁵¹

I. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang akan menyusun lakukakan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui belum ditemukan karya ilmiah yang membahas topik ini. Terkadang terdapat karya ilmiah yang berbentuk, buku, artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun setidaknya penulis akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapaun beberapa referensi yang bisa penulis jadikan rujukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, buku karya Mashuri Maschab yang berjudul “ *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*”. Diterbitkan di Yogyakarta oleh Polgop UGM.⁵² buku ini berisi tentang keadaan desa pada masa Hindia Belanda, awal Kemerdekaan di zaman Orde Baru dan Desa pasca Reformasi.

Kedua, Muhammad Yasin, dkk. Ertikel Tentang “ *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*”. oleh Pusat telaah dan Informasi Regional.⁵³ Tulisan artikel ini membahas tentang larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik, sub tema Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

⁵¹ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, h. 111.

⁵² Mashuri Maschab yang berjudul “ *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*”. Diterbitkan di Yogyakarta oleh Polgop UGM. 2003

⁵³ Muhammad Yasin, dkk. Ertikel Tentang “ *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*”. oleh Pusat telaah dan Informasi Regional. 2014

Ketiga, Direktorat Jendral Kementerian Keuangan, *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemerintahan Desa”* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁵⁴ Buku undang-undang ini menjelaskan tentang kedudukan, peran, dan pemberhentian kepala desa.

Keempat, buku karya Soerjono Soekanto. Yang berjudul *“Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”*. Jakarta. CV Ramadja Karya.⁵⁵ Buku ini menjelaskan kaitan dengan Subsatsni Hukum, Setruktur Hukum, dan Budaya Hukum, apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam penegakan hokum itu sendiri.

⁵⁴ Direktorat Jendral Kementerian Keuangan, *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemerintahan Desa”* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁵⁵ Soerjono Soekanto. Yang berjudul *“Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”*. Jakarta. CV Ramadja Karya. 2001